

Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Implementation of Regional Development Planning in Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province

Andi Tenry Sose¹, Suparman Makka², Hasni³, Andi Ismawaty⁴, Lukman Arifin⁵

STIM Lasharan Jaya, Makassar¹

Universitas Indonesia Timur, Makassar^{2,4}

STIPK 17 Agustus 1945, Makassar^{3,5}

Email: Tenrysose@yahoo.com¹, suparman.mekka@uit.ac.id²
hasnipodding@gmail.com³

(Diterima: 12-Agustus-2020; di revisi: 11- September-2020; dipublikasikan: 26-November -2020)

ABSTRAK

Bappeda Kabupaten Polewali selaku badan perencana pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belum menunjukkan hasil yang optimal dilihat dari aspek-aspek penyediaan data dan informasi, konsistensi Bappeda mengikuti tahapan-tahapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dan perencanaan program kerja dan anggaran dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisis ada dengan reduksi, oleh data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain adalah; Adanya Koordinasi, Partisipasi Masyarakat, serta Komitmen pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, Perencanaan, Pembangunan daerah

ABSTRACT

Polewali District Bappeda as the development planning agency in the preparation of the Regional Government Work Plan (RKPD) has not shown optimal results seen and aspects of data and information provision, Bappeda's consistency in following the stages in development planning deliberations, and planning work programs and budgets are influenced by internal factors and external factors. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques are interviews, observation and documents. There are analysis techniques by reduction, by data and by drawing conclusions. The results showed that the technical policy formulation process for development planning, there were several influencing factors, both supporting factors and factors that hindered the progress of the process. Supporting factors include; There is coordination, community participation, and government commitment.

Keywords: Implementation, Planning, Regional development

PENDAHULUAN

Keberhasilan Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan aparatur Bappeda serta dukungan dan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah dalam mengendalikan atau melaksanakan keseluruhan mekanisme yang telah ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Di samping itu, berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa Bappeda dalam melaksanakan fungsinya selaku perencana di daerah belum optimal dalam menyusun dan mengimplementasikan perencanaan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik, kurangnya kesesuaian antara program kerja yang diputuskan dengan implementasinya, kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan akuntabilitas publik serta lemahnya koordinasi dan kerjasama. Hal ini dapat dibuktikan dan kenyataan yang menunjukkan bahwa sering perencanaan yang dibuat tidak melalui mekanisme perumusan perencanaan yang sesuai dengan musyawarah perencanaan pembangunan bahkan implementasinya sering menyimpang dari perencanaan semula. Selain itu, beberapa kelemahan Bappeda Kabupaten Polewali yang dirasakan yaitu dalam hal koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal masih kurang. Fakta yang terjadi adalah terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi antara perencana dan para pejabat di daerah menyangkut skala prioritas pembangunan yang dilaksanakan.

Bappeda Kabupaten Polewali selaku badan perencana pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belum menunjukkan hasil yang optimal dilihat dari aspek-aspek penyediaan data dan informasi, konsistensi Bappeda mengikuti tahapan-tahapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dan perencanaan program kerja dan anggaran. Di samping itu, dilihat dari beberapa faktor yang berpengaruh menyangkut faktor internal organisasi yang terdiri dari; kemampuan aparat, sarana dan prasarana, program kerja, dan dukungan Pemerintah Daerah yang belum optimal dan terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, faktor eksternal yang juga menentukan peningkatan capaian kinerja Bappeda yang meliputi; dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan komponen masyarakat stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, secara aksiomatik harus selalu didukung oleh sarana dan prasarana dalam bentuk infrastruktur organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai actors dalam upaya mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku atau actors yang terdapat dalam organisasi itu. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi. Dengan kata lain, bila kinerja sumber daya aparatur pemerintah baik, maka paling tidak besar kemungkinan kinerja instansi pemerintah juga baik.

Dalam menciptakan kinerja sumber daya aparatur pemerintah yang baik, maka aparatur haruslah mempunyai keahlian (*skill*) yang tinggi, bersedia bekerja karena sudah digaji sesuai dengan peraturan atau perjanjian sebelumnya, mempunyai harapan yang tinggi (*high expectation*) masa depan yang lebih baik. Gaji dan adanya harapan merupakan dua hal

yang dapat menciptakan motivasi seseorang untuk bersedia melaksanakan kegiatan pekerjaan berdasarkan kinerja yang tinggi pula. Jadi, bila sekelompok sumber daya aparatur pemerintah dan seluruh jajaran pimpinan mempunyai kinerja yang baik, maka akan dapat berimbang dan berdampak positif pada kinerja instansi pemerintah yang baik.

Berkaitan dengan hal di atas, (Davis, 2004) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja atau prestasi kerja yang tinggi yaitu faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*). Dimana:

Human performance = *Ability + Motivation*

Motivation = *Attitude + Situation*

Ability = *Knowledge + Skill*

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari kemampuan potensi (*Intellectual Quotient*) dan kemampuan (*ability*) yakni perpaduan antara *knowledge* dengan *skill*, sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut (Mustopadidjaja AR, 2003) bahwa dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah menetapkan lima indikator kinerja, yaitu; indikator inputs (masukan), outputs (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat), dan impacts (dampak), pada setiap kegiatan. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dan suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan Kinerja organisasi pemerintah dapat mencapai hasil yang tinggi, hanya jika semua unsur atau komponen yang ada dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama dan masing-masing mengetahui fungsi dan tugas yang dibebankan.

1. Pengertian Lingkungan Organisasi

Bahwa suatu organisasi dalam proses perjalanannya untuk mencapai tujuannya, tidak akan pernah lepas dan pengaruh lingkungan. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sangat tergantung pada seberapa besar dukungan lingkungan yang diperolehnya.

(Robbins, 2015) memberikan pengertian lingkungan yaitu segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa lingkungan dapat dibedakan atas dua macam yaitu; lingkungan umum yang mencakup kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi, namun, relevansinya tidak sedemikian jelas. Kemudian lingkungan khusus yakni bagian dan lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Kapanpun, lingkungan khusus adalah bagian dan lingkungan yang menjadi perhatian manajemen karena terdiri dari konstituen kritis yang secara positif atau negatif mempengaruhi keefektifan organisasi.

Lingkungan yang meliputi lingkungan kerja terdekat yakni sikap dan tindakan rekan dan penyelia serta iklim yang mereka ciptakan. Lingkungan terdekat khususnya penyelia sangat mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan dengan sun tauladan dan Instruksi melalui imbalan dan sanksi yang berkisar pada pujian, peningkatan upah, promosi sampai dengan kritik, penurunan pangkat, dan pemecatan (Stoner, 2016). Ketidakcocokkan watak, tabiat, dan tindak tanduk sering menyebabkan situasi kerja menjadi tidak harmonis dan akan berdampak benar-benar sulit mengharapkin kinerja dan produktifitas kerja pegawai yang tinggi.

Di lain pihak, (Kast dan Rosenzweig, 2005) menyatakan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu di luar batas organisasi. Keduanya memandang lingkungan dengan dua cara; (1) lingkungan sosial (umum) yang mempengaruhi semua kegiatan organisasi dalam masyarakat, (2) lingkungan tugas (khusus) yang lebih langsung mempengaruhi kinerja organisasi individual itu. Selanjutnya (Thoha, 2010b) mengatakan bahwa suatu organisasi akan dapat berfungsi dengan baik apabila terbuka dan selalu menjalin hubungan kerja dengan lingkungannya. Karena dengan menjalin hubungan kerja yang serasi, maka organisasi akan dapat membagi informasi dan sumber-sumber daya lainnya dengan lingkungannya. Namun, di sisi lain (Thoha, 2010a) juga mengingatkan bahwa keadaan lingkungan yang sulit diterka perkembangannya membuat organisasi di masa-masa yang akan datang menjadi lebih saling tergantung dengan lainnya.

Berkaitan dengan aspek-aspek lingkungan birokrasi pemerintah, (Steers, R. M., and Porter, 2000) menyatakan bahwa lingkungan mencakup dua aspek, yakni; (1) lingkungan eksternal, adalah semua kekuatan yang timbul di luar atas batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi, dan (2) lingkungan internal, yaitu faktor-faktor di dalam organisasi yang merupakan mekanisme organisasi dalam mencapai tujuannya.

Dengan demikian, Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan di daerah sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dengan tegas mensyaratkan keaktifan dan keterlibatan dan seluruh komponen anggota organisasi yang mempunyai sumber daya dan kemampuan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor internal organisasi seperti; kemampuan aparatur, sarana dan prasarana, program kerja, mekanisme atau sistem dan dukungan pemerintah daerah merupakan bagian yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dan dapat mendukung peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut (Handoko, 2013) bahwa lingkungan eksternal organisasi mempunyai unsur-unsur yang berpengaruh langsung yang terdiri dan; para pesaing, langganan, lembaga-lembaga keuangan, pasar tenaga kerja dan wakil-wakil pemerintah. Kemudian yang berpengaruh tidak langsung yaitu; teknologi, ekonomi, politik dan sosial dimana mempengaruhi iklim organisasi dalam melaksanakan program dan kebijakan. Strategi dalam membangun hubungan organisasi sangat penting sehingga organisasi memiliki perubahan (Zainal, Guntur, Rakib, & Farwita, 2018; Zainal et al., 2020). Dalam melakukan perubahan suatu lembaga publik, memang tidak bisa terjadi begitu saja, tetapi akan selalu

dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial, yang meliputi struktur masyarakat, kondisi ekonomi, sosiokultural, politik dan lain sebagainya. Lingkungan eksternal dapat menunjang proses pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Menurut (Mustopadidjaja AR, 2000) bahwa faktor-faktor kunci keberhasilan yang berasal dari eksternal dapat berupa, adanya komitmen pemerintah atau komitmen yang seharusnya ada diwujudkan dalam berbagai kebijakan, adanya komitmen masyarakat atau komponen yang seharusnya dibangun dalam masyarakat, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penggunaan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumen. Teknik analisis ada dengan reduksi, oleh data dan penarikan kesimpulan. Wawancara digunakan dengan melakukan interview sejumlah pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah guna menghasilkan informasi yang lebih akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Bappeda terhadap pembangunan di kabupaten dilihat dari sejauhmana pelaksanaan fungsi Bappeda sendiri, serta bagaimana melaksanakan proses perumusan kebijakan teknis yang tercermin dalam proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang telah di gambarkan sebelumnya. Dalam hal proses perumusan kebijakan teknis, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh. Tidak bisa dipungkiri ada banyak hal yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan perumusan kebijakan tersebut, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut.

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merumuskan suatu kebijakan dibidang perencanaan pembangunan yang terlaksana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai pada tingkat kabupaten tentunya karena ditunjang oleh beberapa faktor. Dalam hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber yang ada, maka di simpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung pemerintah dalam menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : a. Adanya Koordinasi, Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan suatu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Dalam praktek penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Musyawarah Perencanaan Pembangunan, koordinasi menjadi arti penting dalam mengatur jalannya beragam tahapan dan kepentingan untuk dirumuskan dalam koridor bersama demi tercapainya tujuan bersama. Dalam konteks Bappeda yang mempunyai areal kerja dalam mengkoordinasikan setiap perangkat perumusan rencana pembangunan di daerah, maka perlu adanya langkah-langkah mewujudkan prinsip-prinsip pengkoordinasian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti yang di utarakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Polewali Mandar bahwasanya: “dalam mengadakan rapat-rapat koordinasi tentang perencanaan pembangunan, pihak Bappeda selalu mengikuti aturan yang sudah tertuang dalam aturan perundang-undangan”.

Koordinasi dalam semua praktek pelaksanaaperumusan kebijakan di Kabupaten

Polewali Mandar menjadi kunci utama dalam proses penetapan kebijakan itu sendiri. Lebih lanjut di utarakan pula oleh Camat Polewali bahwa : “ pengaduan tukar menukar informasi serta koordinasi kepada banyak pihak pada saat diadakan Musrenbang sangat mempermudah kami dalam menetapkan usulan yang mana yang harus ditetapkan, tanpa mendengar saran-saran dari berbagai pihak dalam musrenbang, tentunya sangat sulit untuk menentukan usulan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu”. Dari hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber, dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi antar pihak-pihak dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar, menjadi salah satu kunci dan faktor pendukung dalam kelancaran proses penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. b. Partisipasi Masyarakat, Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar menjadi salah satu indikator keberhasilan proses perumusan kebijakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah karena dari masyarakatlah lahir usulan-usulan kegiatan perencanaan pembangunan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dalam hal pembangunan daerah sangatlah tinggi, hal tersebut tergambar dari besarnya antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh oleh Camat Bulu, bahwa : “ setiap mengadakan forum Musrenbang tahunan tingkat desa/kelurahan, lumayan besar warga yang ikut berpartisipasi. Bahkan banyak diantaranya yang tidak diundang namun tetap hadir dalam forum tersebut. Tapi kami selaku pemerintah di kelurahan memakluminya dan justru bersyukur karena tanpa kehadiran mereka tentunya kami tidak tahu hal apa yang harus dibenahi terlebih dahulu untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan”. Hal serupa di utarakan oleh bapak Abdul Malik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar, bahwa : kelompok-kelompok masyarakat sangat antusias dan bisa di katakan terlalu bersemangat untuk menyampaikan usulan-usulan mereka dalam forum yang kami adakan, namun tetap kami filter mana yang harus di prioritaskan, mana yang tidak “.

Hasil dari setiap wawancara terhadap narasumber menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung untuk ikuandil dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Hal tersebut juga terlihat dari beberapa absens kehadiran pada forum Musrenbang yang diadakan baik itu pada tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung pemerintah dalam setiap langkah penetapan kebijakan perencanaan pembangunan karena dari masyarakat sendirilah kebijakan-kebijakan tersebut berasal. c. Komitmen Pemerintah, Komitmen adalah hal yang paling dibutuhkan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam hal menjaga komitmen dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar, komitmen telah diangkat sejak rapat pra persiapan Musrenbang dalam bentuk nota kesepahaman antar pihak yang terlibat dalam prosesnya kelak.

Hal tersebut diungkap pula dalam wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Polewali Mandar : “ komitmen yang dibangun dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah telah diamanatkan oleh Bupati Polewali Mandar dalam pidato pembukaan rapat pra persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan” . Selain adanya kesepahaman yang dibangun bersama pihak-pihak terkait, untuk menjamin komitmen juga diperlukan aturan-aturan yang mengikat serta pengawasan

yang mendalam pada proses perencanaan tersebut. Mengenai komitmen yang dibangun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar menyambung dalam penjelasannya bahwa : “.....untuk persoalan komitmen bukan hanya dibangun oleh Dinas Kesehatan melainkan seluruh Dinas yang ada di Kabupaten Polewali Mandar untuk tetap membuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas daerah dalam forum perencanaan pembangunan “. Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa adanya komitmen menjadi satu hal yang sangat penting dan bahkan menjadi salah satu faktor yang menjadikan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah lebih mudah dan lancar.

2. Faktor Penghambat

Dalam proses penyelenggaraan Musrenbang untuk menetapkan suatu kebijakan teknis perencanaan pembangunan, tidak bisa di pungkiri bahwa terdapat hal-hal yang menghambat berjalannya proses tersebut, hal-hal atau faktor-faktor yang menghambat tersebut diketahui dari hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber yang ada. Dari hasil penelitian itulah diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : a. Penyesuaian Anggaran, Kerangka anggaran menjadi hal yang mesti diperhatikan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah tidak terganggu. Hasil Musrenbang memuat kerangka anggaran rencana kegiatan yang perlu di biayai oleh sumber pendanaan baik itu APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber danalainnya. Dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar, hal yang paling memakan banyak waktu adalah persoalan bagaimana membagi dan menentukan besaran jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap usulan kegiatan yang di prioritaskan. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Bappeda kabupaten Polewali Mandar yang mengatakan bahwa : “..setelah masuk semua rekapitulasi hasil Musrenbang dari berbagai Kecamatan dan SKPD terkait, kasulitan yang dihadapi selanjutnya bagaimana menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah dengan pemutakiran pendanaan yang berasal dari APBD dan APBN serta sumber pendanaan lainnya “. Sama halnya pada Musrenbang tingkat kecamatan, untuk merangkum daftar usulan prioritas tentunya hal yang di pertimbangkan terlebih dahulu adalah masalah anggaran, seperti yang di utarakan oleh Camat Binuang yang mengatakan : “ kami selalu berusaha memprimemprioritaskan usulanusulan dari masyarakat mengenai kegiatan yang mereka ajukan tapi lagi-lagi tidak semua bisa dipenuhi karena faktor anggaran “.

Perhitungan alokasi anggaran terhadap usulan kegiatan pembangunan juga sangat penting karena akan menjadi bahan referensi anggota DPRD dari wilayah kecamatan yang bersangkutan, wawancara dengan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Polewali Mandar mengungkap bahwa : “ Berita Acara hasil Musrenbang tetap akan menjadi referensi bagi DPRD dalam forum pembahasan KUA PPAS dan RAPBD, hasil tersebut biasanya diterima oleh anggota dewan dari wilayah pemilihan masing-masing kecamatan”.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan mengacu kepada usulan kegiatan yang ada pada musrenbang. Setiap usulan dibahas untuk selanjutnya di tetapkan sebagai usulan kegiatan prioritas dalam penetapan kebijakan. Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari proses pemilihan begitu

banyak usulan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, namun dalam prosesnya terkadang penyaringan usulan kegiatan tersebut menjadi salah satu kendala yang cukup berarti bagi tim penyelenggara maupun pemerintah dalam proses Musrenbang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi munculnya begitu banyak usulan-usulan kegiatan. Semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan maka semakin banyak pula usulan yang diajukan dalam forum tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain adalah; Adanya Koordinasi, Partisipasi Masyarakat, serta Komitmen pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penghambat proses perumusan kebijakan antara lain adalah; Penyesuaian/kesiapan anggaran, Usulan yang terlalu banyak, serta Keterbatasan dokumen penunjang

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, K. & J. N. (2004). *Perilaku Dalam Organisasi. ed. Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, T. H. (2013). *Mengukur Kepuasan Kerja*. Jakarta: Erlangga.
- Kast dan Rosenzweig. (2005). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustopadidjaja AR. (2000). *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: LAN.
- Mustopadidjaja AR. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN.
- Robbins, S. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Steers, R. M., and Porter, L. W. (2000). *Motivation and work behavior, 3 rd*. Singapore: Mc Graw-Hill.
- Stoner, J. A. F. (2016). *Management*. New York: Prentice Hall International, Inc Englewood Cliffs.
- Thoha, M. (2010a). *Birokrasi dan Politik di Indonesia Edisi I, Cetakan ke-7*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. (2010b). *Peningkatan Kompetensi menuju SDM Berkualitas*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Zainal, H., Guntur, M., Rakib, M., & Farwita, S. (2018). Human Resource Development Strategy Through Education and Training, 3(3), 26–30.
- Zainal, H., Rakib, M., Ashar, A. I., Manda, D., Sose, T., & Setitit, I. (2020). Strategy of human resources development in improving performance Apparatus in the Bone Regency Regional Inspectorate, 2(1), 35–44.